

Optimizing The Role Of Training Institutions In Implementing Love-Based Curriculum In Madrasahs

Optimalisasi Peran Lembaga Pelatihan dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah

Mohamamd Halomoan Lubis

Balai Diklat Keagamaan Medan, Kementerian Agama, Indonesia

Email: bdkmedanhalomoan@gmail.com

Abstract

The launch of the Love-Based Curriculum (Kurikulum Berbasis Cinta/KBC) by Indonesia's Ministry of Religious Affairs in 2025 represents a transformative innovation in Islamic education. KBC seeks to foster "schools of love" by instilling values of compassion, moderation, and ecological awareness. This study aims to analyze the role of the Ministry's internal training institutions—the Center for Competency Development (Pusbangkom), Religious Training Centers (BDK), and Religious Training Units (LDK)—in accelerating and sustaining the implementation of KBC. Employing a descriptive qualitative approach, the research combines library study and policy analysis. Data were drawn from official regulations, government documents, and academic literature on curriculum reform, teacher training, and religious moderation. The findings indicate that the Ministry possesses a strong training ecosystem, including institutional networks, professional trainers (Widyaiswara), and digital-based learning facilities. Nevertheless, a key challenge lies in the limited involvement of training institutions during the early planning stages of KBC. The study concludes that comprehensive engagement of these institutions—from planning to implementation and evaluation—is essential. Further research is recommended to conduct empirical case studies in madrasahs to assess the effectiveness of KBC training models.

Keywords: Love-Based Curriculum, teacher training, madrasah, Ministry of Religious Affairs, education policy.

Article history: Submission Date: August 27, 2025 Revised Date: August 30, 2025 Accepted Date: August 30, 2025

PENDAHULUAN

Peluncuran Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 menjadi tonggak baru dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kurikulum ini diprakarsai oleh Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., yang menekankan pentingnya cinta sebagai prinsip dasar pendidikan menuju terciptanya madrasah penuh cinta. Implementasi KBC dijadwalkan berlaku pada tahun ajaran 2025–2026 di seluruh jenjang madrasah: Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). KBC dirancang tidak sekadar sebagai kerangka teknis pembelajaran, tetapi sebagai paradigma transformatif untuk menanamkan nilai kasih sayang, harmoni sosial, kesadaran ekologis, dan peradaban berbasis sikap saling mencintai. Visi besar ini sejalan dengan agenda Indonesia Emas 2045, yang menekankan pembangunan manusia unggul dan berkarakter (Kementerian

PPN/Bappenas, 2022).

Fenomena global menunjukkan bahwa krisis sosial dan lingkungan semakin mengemuka: meningkatnya intoleransi, perpecahan sosial, degradasi ekologi, serta krisis makna hidup dalam masyarakat modern (Bauman, 2017; Goleman, 2020). Dalam konteks Indonesia, laporan World Values Survey (2023) mengindikasikan penurunan kepercayaan sosial (*social trust*) di kalangan generasi muda. Situasi ini menuntut hadirnya kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada kognisi, tetapi juga pada afeksi dan karakter berbasis cinta. Dengan demikian, KBC diposisikan sebagai solusi visioner yang mencoba menjawab krisis tersebut dengan menjadikan cinta sebagai landasan moral, spiritual, dan pedagogis.

Namun, implementasi kurikulum transformatif seperti KBC bukanlah tugas mudah. Sejarah pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan kurikulum sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kesiapan lembaga pendidikan, serta ekosistem pelatihan yang mendukung (Fullan, 2007; Darling-Hammond et al., 2020). Pengalaman implementasi Kurikulum Merdeka sebelumnya memperlihatkan masih adanya gap antara desain kebijakan dan praktik di lapangan akibat terbatasnya pelatihan dan pendampingan guru (Yuliana, 2023). Oleh karena itu, kesiapan SDM madrasah—guru, kepala, maupun pengawas—menjadi faktor kunci untuk menjembatani idealisme KBC dengan kenyataan di ruang kelas.

Dalam konteks inilah, lembaga pelatihan internal Kementerian Agama memiliki peran strategis. Transformasi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSPDM) menegaskan prioritas baru Kemenag pada penguatan moderasi beragama dan pengembangan SDM. Lembaga-lembaga pelatihan seperti Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom), Balai Diklat Keagamaan (BDK), dan Loka Diklat Keagamaan (LDK) telah memiliki ekosistem pelatihan yang mapan, mulai dari ketersediaan Widyaiswara profesional hingga fasilitas digital learning. Penelitian Lubis (2025) menunjukkan bahwa 75% madrasah di Sumatera Utara berhasil meningkatkan kinerja setelah mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka berbasis komunitas. Data ini mengindikasikan kapasitas pelatihan Kemenag mampu mendukung skala implementasi kurikulum nasional.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai peran lembaga pelatihan internal Kementerian Agama dalam mempercepat sekaligus menjaga keberlanjutan implementasi KBC. Berbeda dengan studi sebelumnya yang menitikberatkan pada kesiapan kurikulum atau kompetensi guru secara individu (Hidayat, 2022; Latifah & Rahman, 2023), tulisan ini memfokuskan pada kapasitas kelembagaan pelatihan Kemenag sebagai *agent of change*. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menawarkan perspektif teoretis, tetapi juga rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan untuk memastikan KBC dapat diimplementasikan secara efektif, luas, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, muncul problem penelitian yang krusial: bagaimana peran dan fungsi lembaga pelatihan internal Kementerian Agama—Pusbangkom, BDK, dan LDK—dapat dioptimalkan dalam mengakselerasi sekaligus menjaga keberlanjutan implementasi Kurikulum Berbasis Cinta di madrasah?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan yang dipadukan dengan analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai peran lembaga pelatihan internal Kementerian Agama dalam mendukung implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Studi kepustakaan memberikan ruang untuk mengeksplorasi dokumen kebijakan, regulasi, dan panduan resmi, sedangkan analisis kebijakan memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesesuaian antara visi KBC dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki Kemenag.

Data penelitian diperoleh melalui telaah berbagai dokumen resmi pemerintah, antara lain Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan KBC, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan SDM, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 yang

mengatur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pendidikan dan pelatihan keagamaan. Selain itu, data juga bersumber dari hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku, serta laporan akademik yang relevan dengan tema kurikulum transformatif, moderasi beragama, dan pengembangan SDM pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada sumber data yang beragam guna memperkaya analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, membaca secara kritis, dan menginterpretasi dokumen maupun literatur yang terkait dengan isu KBC dan peran lembaga pelatihan. Seluruh informasi kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan mereduksi data agar terfokus pada tema-tema utama, kemudian mengelompokkan informasi ke dalam kategori seperti kapasitas kelembagaan, peran Widyaiswara, sarana dan prasarana pelatihan, serta strategi pendampingan. Selanjutnya, hasil kategorisasi tersebut diinterpretasikan melalui kerangka analisis kebijakan sebagaimana dikemukakan Dunn (2018), yang meliputi identifikasi masalah, perumusan alternatif solusi, dan rekomendasi kebijakan strategis.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian akademik, dan kajian literatur internasional. Pendekatan ini dipandang penting agar analisis tidak hanya berpijak pada teks regulasi, tetapi juga pada bukti empiris dan teori pendidikan kontemporer. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang kaya, argumentasi yang kuat, dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengambil keputusan di Kementerian Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Lembaga Pelatihan dalam Pengembangan SDM di Kementerian Agama

Mandat dan Struktur berdasarkan Peraturan Menteri Agama

Kementerian Agama memiliki struktur kelembagaan pelatihan yang telah terdefinisi dengan baik untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM). Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan SDM di lingkungan Kementerian Agama menjadi dasar hukum utama bagi operasional lembaga-lembaga pelatihan tersebut. Sejalan dengan transformasi kelembagaan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) kini berganti nama menjadi Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom), yang terdiri atas dua unit utama: (1) Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan (PK), serta (2) Pusbangkom Manajerial, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (MKMB). Kedua unit ini bertugas menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan sistem pelatihan, serta membina unit pelaksana teknis (UPT) pelatihan di lingkungan Kemenag (Kemenag RI, 2020).

Selain itu, Balai Diklat Keagamaan (BDK) berperan sebagai UPT pelatihan SDM Kemenag di daerah. BDK bertugas melaksanakan pelatihan administrasi, teknis pendidikan, dan teknis keagamaan sesuai dengan kebutuhan wilayah kerjanya. Saat ini terdapat 14 BDK yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Sementara itu, Loka Diklat Keagamaan (LDK) diatur dalam PMA Nomor 15 Tahun 2021 dan berfungsi sebagai UPT yang lebih kecil (setingkat eselon IV), dengan dua unit yang beroperasi, yakni di Pekanbaru dan Lampung (Kemenag RI, 2021).

Jaringan pelatihan yang terdesentralisasi melalui Pusbangkom di tingkat pusat, BDK di tingkat regional, serta LDK di tingkat provinsi, menunjukkan adanya ekosistem pelatihan yang komprehensif. Ekosistem ini dirancang untuk menjangkau tenaga pendidik dan kependidikan secara luas, memastikan pemerataan akses pelatihan, serta mendukung implementasi kebijakan strategis seperti Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Menurut Fullan (2007), keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem pelatihan yang kuat dan terkoordinasi. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur kelembagaan pelatihan Kemenag merupakan modal penting dalam mendukung keberhasilan KBC.

Kapasitas Widyaiswara sebagai Tenaga Pengajar Profesional

Kualitas SDM pelatihan sangat ditentukan oleh keberadaan Widyaiswara, yaitu ASN yang diangkat dalam

jabatan fungsional dan bertugas sebagai tenaga pengajar profesional. Di lingkungan Kemenag, Widyaiswara memiliki kompetensi di tiga rumpun utama: (1) pendidikan, (2) keagamaan, dan (3) administrasi. Data menunjukkan terdapat lebih dari 400 Widyaiswara yang tersebar di pusat maupun daerah dengan kualifikasi akademik mayoritas magister (S2) dan doktor (S3), baik lulusan dalam maupun luar negeri (Lubis, 2025).

Keterlibatan Widyaiswara dalam berbagai pelatihan kurikulum sebelumnya, baik di Kemenag maupun Kementerian Pendidikan, menunjukkan kapasitas adaptif mereka terhadap perubahan kurikulum. Penelitian Darling-Hammond et al. (2020) menegaskan bahwa kualitas pelatihan guru yang difasilitasi oleh tenaga ahli profesional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kurikulum. Dengan demikian, keberadaan Widyaiswara Kemenag merupakan aset penting yang dapat mendukung percepatan implementasi KBC. Tidak memanfaatkan kapasitas ini akan berisiko menimbulkan pemborosan sumber daya dan efektivitas yang rendah.

Ketersediaan Sarana dan Fasilitas Pelatihan yang Memadai

Selain SDM, keberhasilan program pelatihan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Lembaga pelatihan Kemenag telah dilengkapi dengan fasilitas standar, antara lain ruang belajar, aula, asrama, laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi pembelajaran digital (Kemenag RI, 2020). Mayoritas BDK telah mengadopsi platform Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan perpustakaan digital, serta memiliki infrastruktur jaringan yang memungkinkan pelatihan non-klasikal.

Inovasi ini sejalan dengan tren global pendidikan yang semakin mengadopsi model *blended learning* dan pembelajaran digital (Means et al., 2013). Kemampuan untuk mengembangkan pelatihan berbasis teknologi memungkinkan jangkauan yang lebih luas, termasuk madrasah di daerah terpencil. Hal ini selaras dengan temuan Yuliana (2023), bahwa digitalisasi pelatihan dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas implementasi kurikulum.

Dengan demikian, fleksibilitas dan adaptabilitas infrastruktur pelatihan yang dimiliki Kemenag merupakan modal strategis dalam mendukung KBC. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung penyelenggaraan pelatihan secara nasional, tetapi juga mampu menjangkau komunitas madrasah dengan kondisi geografis yang beragam.

Peran dan Fungsi Lembaga Pelatihan dalam Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Baru

Sinergi Lembaga Pelatihan dengan Dirjen Pendis

Lembaga pelatihan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) memiliki posisi strategis dalam pengembangan dan implementasi kurikulum baru, termasuk Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom)—sebelumnya dikenal sebagai Pusdiklat—memiliki mandat eksplisit untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum pelatihan, bahkan untuk kurikulum yang belum ditetapkan oleh instansi pembina eksternal (PMA No. 19 Tahun 2020). Proses ini mencakup pelibatan pemangku kepentingan, seperti Widyaiswara, penyelenggara pelatihan, alumni, dan pakar pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum partisipatif yang menekankan integrasi pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis (Print, 2020).

Implementasi KBC dirancang melalui tahapan persiapan, uji publik, *pilot project*, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam panduan resmi, tahap pelaksanaan menekankan pelatihan bagi guru, kepala madrasah, dan pengawas. Keterlibatan aktif Pusbangkom sejak fase persiapan dan uji publik akan menjembatani kesenjangan antara desain kurikulum yang dirancang Ditjen Pendis dengan realitas implementasi di madrasah. Tanpa sinergi ini, risiko duplikasi upaya dan kesenjangan kebijakan-lapangan akan semakin besar, sebagaimana pernah terjadi pada transisi implementasi Kurikulum 2013 (Sutopo & Slamet, 2019).

Pada tahap ini Pusbangkom bersama Direktorat Jendral Pendidikan Islam telah mengembangkan modul pelatihan bersama sama tim Inovasi dan mitra strategis dari Welas Asih dengan istilah Panca Cinta. Panca Cinta meliputi Cinta Allah dan rasulNya, Cinta Ilmu, Cinta Alam, Cinta diri dan sesama manusia serta terakhir Cinta Tanah Air.

Modul ini kemudian diimplementasikan dalam sebuah program Pra Training of Facilitator di Peacesantren Welas Asih Garut. Kemudian diterapkan dalam Training of Facilitator yang melibatkan keperstaan dari unsur pengawas, guru, kepala madrasah dan widyaiswara.

Model Keterlibatan Lembaga Pelatihan: Dari Pelatihan Guru hingga Pendampingan Berkelanjutan

Lembaga pelatihan Kemenag dapat mengadopsi model keterlibatan komprehensif yang meliputi pelatihan awal, pelatihan berjenjang, hingga pendampingan berkelanjutan. Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2020, tujuan pelatihan SDM adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga desain pelatihan KBC perlu berfokus pada dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Pendekatan ini penting karena KBC bukan hanya mentransfer konsep, tetapi juga menanamkan nilai cinta, moderasi, dan kepedulian ekologis.

Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan guru yang efektif tidak dapat berhenti pada *one-shot training*, melainkan harus berkelanjutan dan berbasis praktik kelas (Darling-Hammond et al., 2017). Oleh karena itu, peran lembaga pelatihan dalam menyediakan mekanisme *coaching*, *mentoring*, dan *benchmarking* sangat penting. Selain itu, mendahulukan pelatihan kepala madrasah dan pengawas dapat menciptakan efek pengganda karena mereka berfungsi sebagai manajer perubahan dan pendamping guru di lapangan (Hallinger, 2018).

Integrasi nilai *eco-theology* dalam modul pelatihan juga dapat memperkuat aspek cinta lingkungan dalam KBC, melampaui sekadar "*green-cognitive*" menjadi "*green-attitude*" dan "*green-leadership*." Model ini sejalan dengan gagasan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2021) serta memperkuat gerakan Adiwiyata yang telah lama berjalan di lingkungan pendidikan.

Konsep ini dapat ditemukan dalam implementasi Panca Cinta terutama dalam klausul Cinta Alam. Pada modul yang tersedia para fasilitator diajak untuk merasakan langsung situasi iniketika melakukan kunjungan ke salah satu sekolah model yang telah mengembangkan konsep green campus. Dimana pengembangan fasilitas pembelajaran dengan tetap mempertahankan kontur lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan ekologi.

Studi Kasus dan Dampak Positif Keterlibatan Lembaga Pelatihan

Keterlibatan lembaga pelatihan Kemenag mampu memberikan dampak nyata. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* (Lubis, 2025) menunjukkan bahwa 75 persen dari 70 madrasah yang mengikuti pelatihan Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas mampu melakukan pengimbasan ke 485 madrasah lainnya. Temuan ini membuktikan kapasitas BDK dalam menggerakkan transformasi kurikulum melalui pendekatan komunitas.

Selain itu, Pusbangkom Tenaga Teknis berhasil menyelenggarakan pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka melalui platform MOOC Pintar yang diikuti lebih dari 160.000 peserta pada tahun 2024 (Kemenag, 2024). Kuantitas ini menunjukkan kapasitas jaringan pelatihan berbasis teknologi informasi milik Kemenag yang relevan untuk mendukung implementasi KBC secara luas.

Pengalaman masa lalu memperlihatkan bahwa kelemahan terbesar dalam implementasi kurikulum adalah minimnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan (Yuliana, 2023). Oleh karena itu, mengabaikan lembaga pelatihan internal dalam KBC merupakan kelemahan kritis yang berisiko menghasilkan kesenjangan antara desain kurikulum dan praktik pembelajaran. Sebaliknya, melibatkan Pusbangkom, BDK, dan LDK secara penuh merupakan langkah pragmatis sekaligus strategis, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun keberlanjutan kebijakan pendidikan.

Sampai penelitian ini dilakukan, Pusbangkom SDMPK masih terbatas dalam menyelenggarakan pelatihan fasilitator untuk implementasi KBC. Hal ini dapat dibaca dari aspek keterbatasan dukungan operasional, namun sejatinya dapat dilakukan kontinuitas program. Artinya jika tahun 2025 baru mampu menyelenggarakan 3 gelombang pelatihan fasilitator maka ke depan dapat dirancang pelatihan lanjutan untuk memperluas resonansi gerak.

Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Peran Lembaga Pelatihan dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta

Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Antar Unit Eselon I

Keberhasilan implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) memerlukan koordinasi lintas-unit di Kementerian Agama. Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Pendis) harus memperkuat kolaborasi dengan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) beserta Pusbangkom SDMPK, Balai Diklat Keagamaan (BDK), dan Loka Diklat Keagamaan (LDK). Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah pembentukan gugus tugas lintas-eselon I untuk menyusun panduan implementasi, merancang program pelatihan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan akibat lemahnya koordinasi antarlembaga berdampak pada ketidakefektifan implementasi kurikulum (Sutopo & Slamet, 2019). Dengan formalitas kelembagaan—misalnya melalui Surat Keputusan Menteri Agama tentang Gugus Tugas Implementasi KBC—dapat dipastikan adanya integrasi vertikal (antara pembuat kebijakan dan pelaksana) dan horizontal (antarunit Kemenag). Hal ini sejalan dengan temuan Fullan (2007) yang menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam reformasi kurikulum.

Pemanfaatan Penuh Kapasitas Internal Lembaga Pelatihan

Optimalisasi implementasi KBC memerlukan pemanfaatan penuh aset internal Kemenag. Pusbangkom harus diberi mandat eksplisit untuk menyusun modul pelatihan KBC secara komprehensif, melibatkan Widyaiswara sebagai tenaga pelatih utama. Jaringan BDK dan LDK yang tersebar di seluruh Indonesia perlu dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pelatihan secara berjenjang, baik melalui tatap muka maupun metode non-klasikal seperti *Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)* dan *Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK)*.

Penguatan kapasitas Widyaiswara juga perlu menjadi prioritas melalui program *Training of Trainers (ToT)* berbasis *research and development (R&D)* agar mereka mampu berperan sebagai agen perubahan. Pendekatan ini lebih efisien dibandingkan penggunaan konsultan eksternal, serta mendukung kemandirian kelembagaan jangka panjang (Darling-Hammond et al., 2017). Sejalan dengan model pengembangan kapasitas UNESCO (2021), strategi ini dapat memperkuat ekosistem pembelajaran di madrasah sekaligus memastikan keberlanjutan reformasi pendidikan.

Penyusunan Pedoman Keterlibatan yang Jelas dan Berkelanjutan

Untuk menghindari peran lembaga pelatihan yang bersifat ad-hoc, Kementerian Agama perlu menyusun petunjuk teknis (juknis) atau pedoman operasional standar (POS) yang merinci peran lembaga pelatihan dalam setiap tahapan implementasi KBC. Pedoman ini harus mencakup sosialisasi, pelaksanaan pelatihan, mekanisme pendampingan, hingga evaluasi. Alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan juga harus dijamin untuk mendukung keberlangsungan program.

Studi kasus implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman teknis yang jelas berdampak pada terjadinya variasi pelaksanaan dan lemahnya kualitas pendampingan (Yuliana, 2023). Dengan menginstitutionalisasi keterlibatan lembaga pelatihan melalui regulasi dan anggaran khusus, Kemenag dapat memastikan akuntabilitas, konsistensi, serta keberlanjutan implementasi KBC. Strategi ini juga sejalan dengan praktik *best practices* internasional yang menekankan pentingnya standardisasi proses pelatihan dalam reformasi pendidikan (OECD, 2019).

Hasil penelitian ini memperkaya kajian tentang implementasi kurikulum transformatif dengan menambahkan perspektif kelembagaan pelatihan sebagai variabel kunci dalam keberhasilan reformasi pendidikan. Temuan ini memperluas literatur mengenai hubungan antara *policy design* dan *policy implementation* dalam studi kebijakan pendidikan (Fullan, 2007; Spillane et al., 2018), serta menegaskan pentingnya pendekatan sistemik dalam menghubungkan kurikulum, guru, dan lembaga pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada teori implementasi kebijakan pendidikan di konteks keagamaan dan madrasah.

Secara praktis, penelitian ini memberikan arahan strategis bagi Kementerian Agama untuk memanfaatkan aset internalnya secara maksimal. Pelibatan Widyaiswara sebagai agen perubahan, pemanfaatan jaringan BDK dan LDK untuk pelatihan berjenjang, serta penguatan koordinasi antarunit eselon I dapat menjadi langkah konkret untuk menjamin keberhasilan KBC. Selain itu, penyusunan pedoman teknis yang jelas akan meningkatkan konsistensi implementasi, sementara penguatan pelatihan berbasis *eco-theology* berpotensi memperluas dampak KBC pada ranah kepedulian lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengambil kebijakan Kemenag, tetapi juga bermanfaat bagi praktisi pendidikan di madrasah yang menjadi ujung tombak implementasi KBC.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sangat ditentukan oleh optimalisasi peran lembaga pelatihan internal Kementerian Agama, yaitu Pusbangkom, Balai Diklat Keagamaan, dan Loka Diklat Keagamaan. Ketiga lembaga ini memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya Widyaiswara, serta infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung transformasi kurikulum. Namun, tantangan utama terletak pada keterlibatan yang masih terbatas dalam tahap perencanaan dan desain KBC, sehingga menimbulkan risiko kesenjangan antara kebijakan dan praktik di madrasah. Oleh karena itu, pelibatan penuh lembaga pelatihan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi harus diinstitusionalisasikan melalui koordinasi lintas-eselon, pemanfaatan penuh kapasitas internal, dan penyusunan pedoman teknis yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya menjamin efektivitas implementasi KBC, tetapi juga memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ekosistem pelatihan di Kementerian Agama. Penelitian lanjutan disarankan untuk dilakukan melalui studi empiris di madrasah guna menilai efektivitas model pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas dalam kerangka KBC.

REFERENSI

- Bauman, Z. (2017). *Liquid modernity*. Polity Press.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140.
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change*. Routledge.
- Goleman, D. (2020). *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. Bantam.
- Hallinger, P. (2018). Bringing context out of the shadows of leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 46(1), 5–24.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- Hidayat, A. (2022). Kesiapan guru madrasah dalam implementasi kurikulum berbasis karakter. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 145–160.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Laporan Pelaksanaan Pelatihan MOOC Pintar*. Jakarta: Pusbangkom.
- Kementerian Agama RI. (2021). *PMA No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan*. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Visi Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Bappenas.
- LAN. (2022). *Laporan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Latifah, N., & Rahman, M. (2023). Implementasi kurikulum merdeka di madrasah: Studi kasus guru PAI. *Jurnal Edukasi Islami*, 8(1), 23–36.
- Lubis, H. (2025). Efektivitas pelatihan kurikulum merdeka berbasis komunitas terhadap peningkatan kinerja madrasah di Sumatera Utara. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 19(1), 34–49.
- OECD. (2019). *OECD future of education and skills 2030: OECD learning compass 2030*. Paris: OECD Publishing.
- Print, M. (2020). *Curriculum development and design* (4th ed.). Sydney: Allen & Unwin.

- Sutopo, A., & Slamet, S. Y. (2019). Problematika implementasi Kurikulum 2013 di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan*, 20(3), 211–223.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. Paris: UNESCO.
- World Values Survey. (2023). *World values survey wave 7*. WVS Database.
- Yuliana, D. (2023). Hambatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 14(1), 77–89.